PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

(Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Periode 2013-2015**)**

DADAN RAMDANI

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Tax revenues are the dominant source of state financing is good for routine and development expenditures. In an effort to increase income tax revenue Article 21, there are problems included the lack of personnel from the tax office are still limited in attracting taxpayers. A tax audit is a fence guards so that taxpayers continue to comply with its obligations, taxpayers take action against tax fraud either by reducing the tax burden payable. The purpose of this study to know how to influence the number of taxpayers and tax audits Personal income tax revenue to Article 21 at KPP Bandung Karees.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to determine the variable overview of Income Tax Article 21 The number of variables influenced the individual taxpayer and tax inspection while verification to find an increase in income tax under Article 21 variables influenced variable Personal Tax Payers and Tax Inspection. To determine the increase in Income Tax Receipts Article 21 variables influenced Personal Tax Payers and Tax Audit used statistical tests.

The results of this study indicate the Income Tax Receipts Article 21 is influenced by the amount of the individual taxpayer and tax inspection at KPP Bandung Karees partially related. Article 21 of the Income Tax Receipts are influenced more by the Tax Inspection compared to the amount of the individual taxpayer

Keywords: *The number of the individual taxpayer, tax inspection, Article 21 of the Income Tax Receipts*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Masih menurut Suryadi (2006), bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:26). Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapati jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Moh Zain, 2007:35).

Pajak tidak hanya ada di Indonesia, dan sudah menjadi fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara diseluruh dunia (Siti Kurnia Rahayu, 2010:12). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selan dari minyak dan gas bumi untuk menandai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab 2008).

Berdasarkan uraian diatas maka dalam membuat laporan Penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul "**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KPP PRATAMA**

KAREES".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menulisakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP
   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tentang pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

2. Bagi Akademisi
   Diharapkan menjadi wacana, memberi masukan dan tambahan literature untuk para akademisi untuk menggali pengetahuannya dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Masyarakat
   Umum memberikan gambaran tentang pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi, sehingga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis
   Diharapkan dengan penelitian ini, dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
2. Bagi Instansi
   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan

pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees.

3. Bagi Pihak Lain
   Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2012:14)tarif pajak adalah Tarif yang digunakan untuk menghitung besar nya pajak yang terutang. Kemudian menurut Theresia Woro Damayanti (2010:18) tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:128) tarif pajak adalah presentase untuk digunakan menghitung besarnya PPh.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah tarif yang di gunakan untuk menentukan besar pajaknya yang harus dibayar.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Hal senada dikatakan oleh Siti Resmi (2009:80) Pajak yang

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkanbahwa Penerimaan Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang atas semua penerimaan penghasilan, baik berupa gaji, upah, honorarium ataupun tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterimanya dalam suatu tahun pajak.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:163) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:21) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban membayar, memotong, dan memungut pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:34) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian Menurut Burton (2001:57) Pemeriksaan pajak (Tax Audit) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak

dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:74) Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya.

2.1.5 Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak Penghasilan menurut Suryadi (2006:105) adalah Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Kemudian menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Sedangkan menurut Siti Resmi (2009:80) Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkanbahwa Penerimaan Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang atas semua penerimaan penghasilan, baik berupa gaji, upah, honorarium ataupun tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterimanya dalam suatu tahun pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan apaak penghasilan Pasal 21

Gunadi (2002:56) Peningkatan penerimaan pajak dapat dilipat duakan secara sederhana dengan melipat duakan jumlah wajib pajak, walaupun dengan jumlah wajib pajak kecil namun kalau jumlah pembayarnya semakin banyak maka jumlah penerimaan akan bertambah. Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu

(2010:50) Semakin banyak jumlah wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Masih menurut Rukiman dan Sarisiti (2011) Jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian menurut Chairuddin Syah Nasution (2003) Jumlah wajib pajak pph pasal 21 orang pribadi yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pph pasal 21 KPP Pratama Manado. Jumlah Wajib Pajak merupakan Keuntungan bagi sektor pajak. Setelah orang pribadi menjadi wajib pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Sehingga dengan semakin banyak Jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP, maka Jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Pasal 21 akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi juga meningkat.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Sopjan Assauri (2012 :115) Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupaka salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut. Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:243) menyatakan Kelalaian atas penyampaian SPT, terlambat membayar pajak, dan hal lain sebagainya yang menyimpang dari peraturan perpajakan maka dapat disebut dengan penyelundupan pajak. Salah satu upaya pencegahan penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Kemudian menurut Erly Suandy (2006:96) Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian menurut Salip (2006) Pemeriksaan

pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan. Sedangkan menurut Gunadi (2005) Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, baik Wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih baik pada tahun mendatang.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian paradigma penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

H2 : Pemerikasan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasl 21.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Definisi metode penelitan menurut Sugiyono (2013:2) adalah Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untukmendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berartikegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional,empiris dan sistematis.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2010:38) adalah Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yangberbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2010:33) adalah Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebabperubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen).

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2010:39) adalah Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Untuk menunjang hasil penelitian tersebut, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengancara:

1. Penelitian Lapangan (*FieldResearch*)

Untuk melihat kenyataan yang sebenarnya dari masalah lapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari bagian terkait dan di lokasi tempat pemberdayaan masyarakat. Adapun langkah-langkah di dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

a. Wawancara(*Interview*)
   Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi.
b. Dokumentasi
   Yaitu suatu langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Teknik yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder atau pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori guna mendukung data primer yang telah diterapkan dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dan mendukung pada masalah yang sedang diteliti.
b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

3.4 Penarikan Sampel

Menurut Andi Supangat (2007:3), Bahwa Populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.

Menurut Sugiyono (2010:116), menyatakan bahwa Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Nonprobability sampling*. Menurut Sugiyono (2010:122), Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 laporan, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah data berupa jumlah wajib pajak, Jumlah SKPKB dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dari tahun 2013-2015 di KPP Pratama Bandung Karees.

3.5 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, Maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Selain itu uji mormalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:62) mendefinisikan uji multikolinieritas sebagai berikut:

“Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas”.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:65) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

“Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas”.

Uji Autokorelasi

Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah sebagai berikut :
“Dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ketiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi”.

3.6 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis

Pengertian rancangan analisis menurut Umi Narimawati (2010:41) adalah:

> “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan diperalajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti”.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Oleh karena itu analisisdalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif.

Definisi Metode Analisis Kuantitatif menurut Sugiyono (2010:8) adalah sebagai berikut :

> "Metode analisis kuantitatif dapat diartikan sebagai metode analisis yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk menelitipada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik.Penyaji ananalisis data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis,grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Data hasilanalisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21pada KPP Pratama Bandung Karees dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda

   Pengertian analisis linier regresi menurut Sugiyono (2010:149) adalah:

   "Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan".

   Sedangkan pengertian Garis Regresi menurut Andi Supangat (2007:352) adalah:

   "Suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dandapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)".

3.6.2 Pengujian Hipotesis

untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta = 0$: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

$H_1 : \beta \neq 0$: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

$H_0 : \beta = 0$: Pemeriksaan Pajaktidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

$H_1 : \beta \neq 0$: Pemeriksaan Pajakberpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

(b) Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel–variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah wajib pajak orang pribadi dalam kurun waktu 2013-2015 terus mengalami peningkatan dan penurunan namun pada bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2014 dimana jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan tajam berada pada titik terendah sebesar 429 wajib pajak terdaftar dari 577 wajib pajak pada bulan bulan Juli 323 wajib pajak terdaftar, yang disebabkan dalam kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dirasa kurang optimal dikarenakan kurangnya pegawai pada seksi ekstensifikasi, dimana pegawai tersebut hanya 8 pegawai pada tahun 2013 hingga pada awal bulan mei tahun 2014, sebab, salah satu petugas seksi ekstensifikasi dimutasi pindah tugaskan, sehingga pegawai tersebut menjadi 7 pegawai ekstensifikasi, yang kemudian ditutupi dengan penarikan pegawai sementara pada seksi lain di bulan Oktober tahun 2014 hingga tahun 2015 agar menjadi 8 pegawai.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak pada KPP Bandung Karees secara rata-rata mengalami pertumbuhan dan penurunan pula, rata-rata peningkatan dan penurunan cukup besar. Perlambatan Pemeriksaan Pajak disebabkan oleh diketahui terdapat 70 persen dari total sengketa atas pemeriksaan antara WP dan mengenai SKPKB mengalami penurunan, dimana dalam hal permasalahan tersebut diakibatkan oleh SPT yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, tahun 2013 pada bulan Juni, Oktober dan Desember, kemudian tahun 2014 pada bulan Januari, Maret, September, Okober, Desember dan tahun 2015 pada Mei, Juli, Agustus, September, Desember, sehingga wajib pajak tersebut diberikan surat ketetapan pajak kurang bayar.

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerimaan pajak penghasilan pada periode 2013-2015 mengalami kenaikan dan penurunan tahun 2013 pada bulan februari sebesar 51% mengalami kenaikan kembali pada bulan juli sebesar 79%. Kemudian tahun 2014 pada bulan februari mengalami penurunan tajam sebesar 41% dan tahun 2015 pada bulan September menglami penurunan sebesar 59% berikutnya kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 16%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Pengasilan Pasal 21

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, besarnya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 4,65% dan sisanya sebesar 94,35% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hubungan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menunjukan hubungan kuat dan bertanda positif, artinya apabila semakin banyak Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikeluarkan.

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

adalah 83,62% dan sisanya sebesar 16,38% dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menunjukan hubungan kuat dan bertanda positif, artinya apabila Pemeriksaan Pajak bertambah, maka akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikeluarkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dihimpun oleh KPP Bandung Karees mengalami pertumbuhan dan penurunan setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian Jumlah Wajib Pajak mempunyai efek yang searah dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21, atau dengan kata lain ketika jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pun akan meningkat.

2. Pemeriksaan Pajak pada KPP Bandung Karees secara rata-rata mengalami pertumbuhan dan penurunan pula, rata-rata peningkatan dan penurunan cukup besar. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan kuat dan positif dalam pengertian Pemeriksaan Pajak mempunyai efek yang searah dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, atau dengan kata lain ketika Pemeriksaan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pun akan meningkat.

5.2 Saran

a. Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 dalam kegiatan jumlah wajib pajak orang pribadi, dalam hal kekurangannya pegawai pajak pada seksi ekstensifikasi. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara menambah pegawai pada seksi ekstensifikasi. DJP dapat menjaring calon pegawai yang berkompeten dalam bidang pajak seperti para lulusan sarjana baru yang nantinya ditempatkan pada KPP yang membutuhkan. Karena dengan kekurangan pegawai pada seksi ekstensifikasi dapat menghambat kegiatan-kegiatan ekstensifikasi pada lingkungan KPP Pratama Bandung Karees yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dalam kegiatan Pemeriksaan Pajak. bagi wajib pajak terdaftar yang bermasalah, baik dalam hal penyampaian SPT hingga kekurangan pembayarannya, kiranya dengan kegiatan sosialisasi terkait sistem yang sudah berbasis *online*, dimana wajib pajak dapat mengetahui secara *realtime* akan jatuh tempo pajaknya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dan keraguan terhadap hasil pemeriksaan.

b. Saran Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya perpajakan.

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain, metode

yang sama ataupun berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A Fuad Rahmani (2016) Pajak Properti Tahun Ini DIpatok Rp 60 Triliun pada 1 april (2016) dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/26/19335/Pajak.Properti.Tahun.Ini.DIpatok.Rp.60.Triliun

Alena (2011) *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia* (2011)

Andi Supangat. 2007.*Statistika dalam Kajian Deskriftif*, Inferensi dan Non parametrik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty.2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak* Pada KPP Pratama. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang.

Donald R.Cooper & Pamela S.Schindler, 2006, "*Bussines Research Methods*" , 9th edition. McGraw - Hill International Edition.

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu.(2010). AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Erly Suandi.2006.Perencanaan Pajak.Jakarta:Salemba Empat

Gunadi, 2005. Akuntansi Pajak, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta

Husein Umar (2008), *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan, Seri Desain Penelitian Bisnis* – No 1, PT Rajagrafindo Persada Jakarta.

Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu.

Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia No.161/KMK.1/2005 Tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dan kantor Pelayanan Pajak. Jakarta.

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Mardiasmo, 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009*. Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Mardiasmo. 2011.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010/Pasal1 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Resmi, Siti, Dra, M.M, Akt.Edisi 6 2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak,* Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono,Perpajakan,Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Salip, dan Tendy Wato: *Jurnal Keuangan Publik*, 2006.

Siahaan Marihot P., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sintawati, Reni. 2014*. Implementasi Pendekatan Saintifik Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Jetis*

Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu, (2009), *Perpajakan Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu.

Sugiyono (2001), *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta Bandung

Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung.

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2011.*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&*D. Bandung:Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Bandung : Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Siahaan, M.P 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

Suryadi. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105 - 121.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi Kelima. Jakarta: salemba empat

Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.

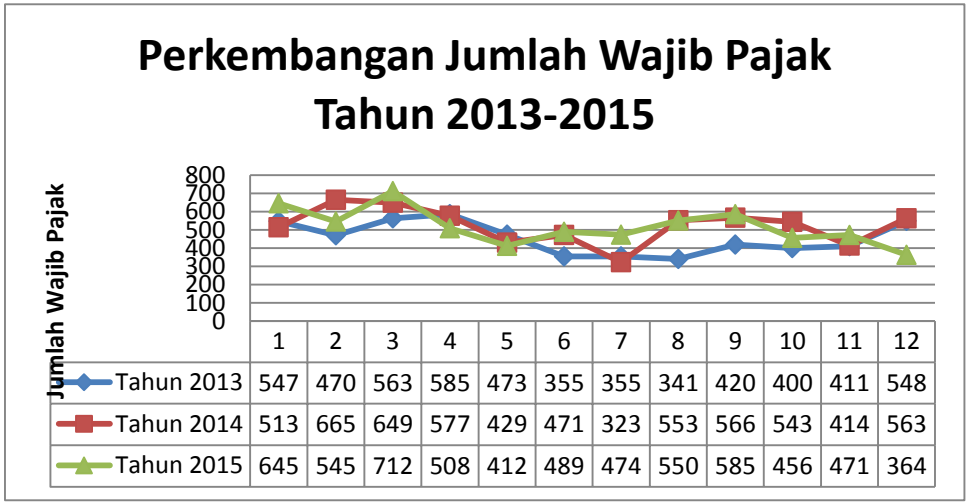
Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Wati Aris Astuti dan Heru Rusdianto. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*.

Zain, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan. Jakarta*: Salemba Empat.

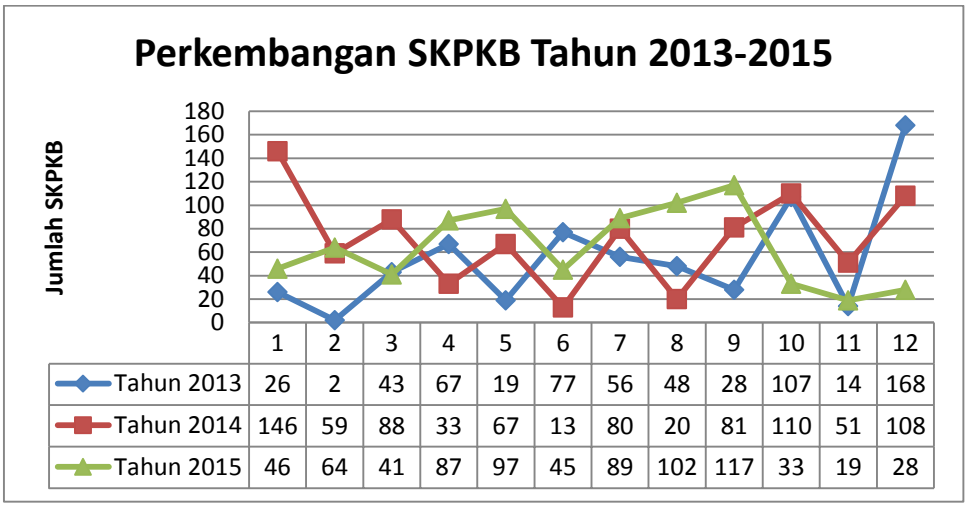
Zakiah M Syahab & Hantoro Arief Gisijanto. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis. No. 2, Vol 13.*

(BAB III, HAL 10)



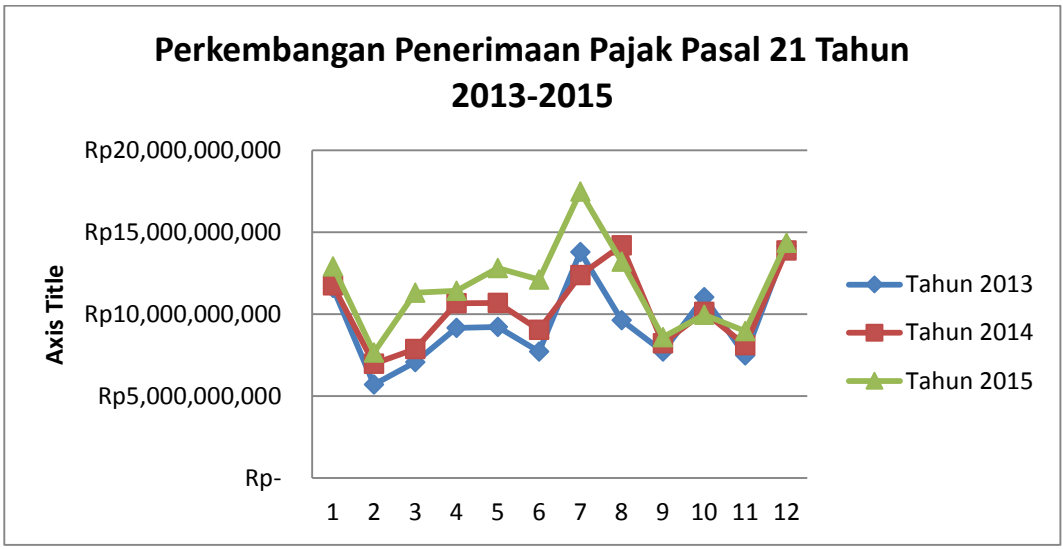
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahun 2013	547	470	563	585	473	355	355	341	420	400	411	548
Tahun 2014	513	665	649	577	429	471	323	553	566	543	414	563
Tahun 2015	645	545	712	508	412	489	474	550	585	456	471	364

(BAB III, HAL 10)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahun 2013	26	2	43	67	19	77	56	48	28	107	14	168
Tahun 2014	146	59	88	33	67	13	80	20	81	110	51	108
Tahun 2015	46	64	41	87	97	45	89	102	117	33	19	28

(BAB III, HAL 11)


Perkembangan Penerimaan Pajak Pasal 21 Tahun 2013-2015
Axis Title
Rp20,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp5,000,000,000
Rp-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015